

## **Analisis perbedaan tingkat kemiskinan dan ketimpangan perdesaan sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa**

**Andi Setiawan**

Subdirektorat Statistik Keuangan, BPS RI. Jalan dr. Sutomo NO. 6-8 Jakarta 75119, Indonesia.  
Email: andisetiawan@bps.go.id, Telp: +6285215781310

### **Abstrak**

Studi ini bertujuan mengetahui adanya perbedaan tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang diwakili rasio gini di perdesaan sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa. Selain itu, ingin dilihat hubungan antara tingkat kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan. Metode yang digunakan untuk menguji adanya perbedaan adalah uji-t sampel berpasangan dan uji peringkat bertanda Wilcoxon yang didasarkan hasil uji normalitas selisih data berpasangan. Uji korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan linier antara tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan kesenjangan di perdesaan, sedangkan tingkat kemiskinan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Terdapat hubungan linier positif yang kuat antara tingkat kemiskinan dan kesenjangan sesudah digulirkannya dana desa. Sedangkan sebelum digulirkannya dana desa, tidak ada hubungan linier yang nyata antara tingkat kemiskinan dan kesenjangan.

**Kata Kunci:** rasio gini; tingkat kemiskinan; ketimpangan; anggaran desa; korelasi

### ***Analysis of differences in poverty levels and rural inequality before and after the village funds are revolved***

#### ***Abstract***

*This study aims to find out the differences in poverty level and gap which are represented by the gini ratio in rural areas before and after the release of village funds. In addition, we want to see the relationship between poverty level and gap in rural areas. The method used to test for differences is the paired sample t-test and the Wilcoxon signed-rank test based on the results of the test of the normality of paired data differences. The Pearson correlation test was used to determine the linear relationship between poverty level and gap. The results of the study indicate a decrease in gap in rural areas, while the poverty level does not show a significant decline. There is a strong positive linear relationship between poverty and inequality after village funds have been rolled out. Whereas before village funds were rolled out, there was no real linear relationship between poverty level and gap.*

**Keywords:** *gini ratio; poverty level; inequality; village budget; correlation*

## **PENDAHULUAN**

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk pengakuan negara terhadap desa yang memperjelas fungsi dan kewenangan desa. Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga menjadi subjek pembangunan. Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional. Untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa maka disalurkan Dana Desa bersumber dari APBN sejak tahun 2015. Tujuannya antara lain mengentaskan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan pembangunan antar desa (Kementerian Keuangan, 2017).

Pembangunan yang sedang dilaksanakan bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh Indonesia. Sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan perdesaan dengan pemerintahan terkecilnya berupa desa/sejenis. Secara nasional, tingkat kemiskinan di perdesaan pada September 2017 mencapai 13,47% jauh lebih tinggi dari perkotaan sebesar 7,26% dengan ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dari perdesaan (BPS, 2018). Besarnya dana desa yang disalurkan dari tahun 2015 sampai 2017 perlu dikaji karena masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan dibandingkan perkotaan. Selain itu, perlu diketahui apakah ketimpangan di perdesaan berkurang dan bagaimana hubungan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kemiskinan dan ketimpangan perdesaan serta hubungan keduanya baik sebelum maupun sesudah digulirkannya dana desa. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan terhadap efektivitas penyaluran dana desa dalam mengentaskan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan di perdesaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada perbedaan tingkat kemiskinan dan ketimpangan perdesaan sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa. Selain itu, terdapat hubungan linier positif antara tingkat kemiskinan dan ketimpangan perdesaan

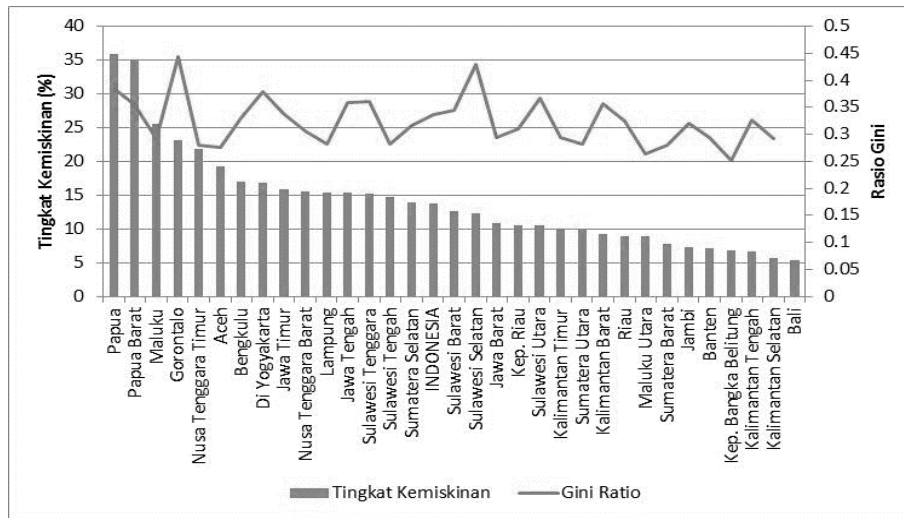
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah data tingkat kemiskinan dan rasio gini perdesaan yang digunakan adalah menurut provinsi. Provinsi Kalimantan Timur tidak dimasukkan dalam penelitian ini terkait ketersediaan data berpasangan karena adanya pemekaran menjadi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistik analitik. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t berpasangan dan uji peringkat bertanda Wilcoxon yang disesuaikan hasil uji normalitas (Mandenhall, 1987). Sedangkan untuk mengetahui hubungan linier digunakan uji korelasi Pearson. Taraf signifikansi digunakan sebesar 0,05. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari BPS berupa data tingkat kemiskinan dan rasio gini perdesaan menurut provinsi pada bulan September 2014 (sebelum digulirkan dana desa) dan bulan September 2017 (setelah digulirkan dana desa). Software yang digunakan adalah IBM SPSS Statistics 24.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

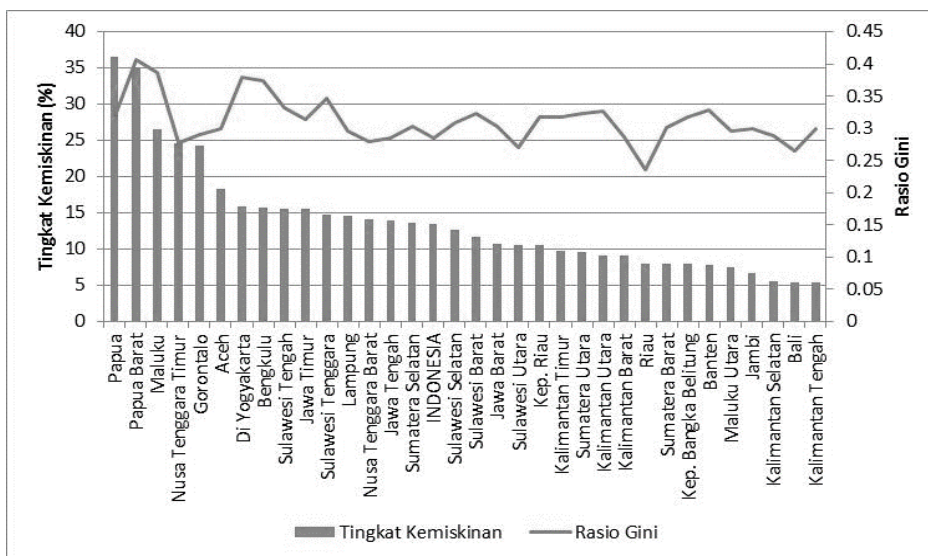
Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan perdesaan tertinggi mencapai 35,87%. Pada urutan kedua Provinsi Papua Barat dengan tingkat kemiskinan sebesar 35,01%, selanjutnya Provinsi Maluku sebesar 25,49%. Ketimpangan perdesaan yang dilihat dari rasio gini tertinggi di Provinsi Gorontalo diikuti Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat kemiskinan perdesaan di 15 provinsi berada di bawah tingkat kemiskinan nasional sebesar 13,76%. Meskipun demikian, terdapat 11 provinsi dengan tingkat kemiskinan perdesaan dibawah 10%. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini Perdesaan Menurut Provinsi 2014

Sumber: BPS, data diolah

Berdasarkan gambar 2, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan perdesaan tertinggi mencapai 36,56%. Pada urutan kedua Provinsi Papua Barat dengan tingkat kemiskinan sebesar 35,12%, diikuti Provinsi Maluku. Ketimpangan pada ketiga provinsi tersebut juga cukup tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Tingkat kemiskinan perdesaan di 15 provinsi berada di bawah tingkat kemiskinan nasional sebesar 13,47%. Terdapat penambahan banyaknya provinsi menjadi 13 provinsi dengan tingkat kemiskinan perdesaan di bawah 10%.



Gambar 2. Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini Perdesaan Menurut Provinsi 2017

Sumber: BPS, data diolah

### **Uji Normalitas**

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Uji Shapiro-Wilk untuk selisih tingkat kemiskinan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,047 (lebih kecil dari 0,05) yang artinya data tersebut tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis perbedaan tingkat kemiskinan perdesaan sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa menggunakan Uji peringkat bertanda Wilcoxon. Sedangkan hasil uji normalitas untuk selisih rasio gini diperoleh signifikansi sebesar 0,09 (lebih besar dari 0,05) yang artinya data tersebut berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis perbedaan rasio gini perdesaan sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa menggunakan Uji t sampel berpasangan.

### **Tingkat Kemiskinan Perdesaan**

Berdasarkan hasil uji peringkat bertanda Wilcoxon diperoleh signifikansi sebesar 0,189 (lebih kecil dari 0,05) yang artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan tidak ada perbedaan tingkat kemiskinan perdesaan menurut provinsi sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya kenaikan tingkat kemiskinan perdesaan di 8 provinsi meskipun sudah digulirkan dana desa yang besar (BPS, 2018). Hal ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu terkait dampak alokasi dana desa perkapita yang berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor (Gumilang, 2017). Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan peningkatan kapasitas dan usaha ekonomi desa masih sangat terbatas (KOMPAK, 2017). Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di perdesaan untuk mengefektifkan penggunaan dana desa dalam mengentaskan kemiskinan.

### **Ketimpangan Perdesaan**

Berdasarkan hasil uji t berpasangan untuk rasio gini diperoleh signifikansi sebesar 0,044 (lebih kecil dari 0,05) yang artinya terdapat perbedaan yang nyata rasio gini sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa. Hasil ini menunjukkan adanya penurunan ketimpangan perdesaan sebesar 0,0125. Rasio gini secara umum menunjukkan penurunan. Digulirkannya dana desa mampu mengurangi ketimpangan pengeluaran di perdesaan. Hal ini diduga terdapat peningkatan pendapatan rumah tangga melalui penggunaan dana desa terutama di bidang pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa.

### **Hubungan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Perdesaan**

Hasil uji korelasi Pearson tingkat kemiskinan dan rasio gini sebelum digulirkannya dana desa diperoleh signifikansi sebesar 0,064 (lebih besar kecil dari 0,05) yang artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan linier positif antara tingkat kemiskinan dan rasio. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap penduduk miskin di Indonesia (Sudarlan, 2015). Sedangkan sesudah digulirkannya dana desa, hasil uji korelasi Pearson diperoleh signifikansi sebesar 0,000 (lebih besar kecil dari 0,05) yang artinya terdapat hubungan linier positif yang kuat antara tingkat kemiskinan dan rasio gini.

### **SIMPULAN**

Tingkat kemiskinan perdesaan tidak berkurang secara signifikan sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa, sedangkan ketimpangan perdesaan menunjukkan adanya pengurangan. Terdapat hubungan linier positif tingkat kemiskinan dan kesenjangan sesudah digulirkannya dana desa, sedangkan sebelumnya tidak ada hubungan linier yang nyata. Dengan tidak adanya perbedaan kemiskinan perdesaan sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa maka diperlukan peningkatan peran serta dan azas keberpihakan rumah tangga dalam perencanaan program pembangunan desa terutama yang bersumber dari dana desa. Diharapkan dengan semakin besarnya dana desa yang disalurkan disertai evaluasi dan pengawasan, tingkat kemiskinan akan berkurang secara signifikan sejalan dengan pengurangan ketimpangan di perdesaan.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Gumilang, MF. (2017). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bogor. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2018.html> di unduh 26 Oktober 2018 pukul 10.31.
- <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/04/26/1116/gini-ratio-provinsi-2002-2018.html> diunduh 26 Oktober 2018 pukul 16.25.
- Kementerian Keuangan. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Jakarta.
- KOMPAK. (2017). Analisa Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
- Mandenhall, W. (1987). Theory and Methods in Social Research (2nd ed.). Los Angeles: Saga.
- Sudarlana. (2015). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Eksis.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.